

(E) Wahid, Abdurrahman	PUSAT DOKUMENTASI SASTRA H.B. JASSIN	
	Semarang: Harian <u>Suara Merdeka</u>	
	Tahun : 55	Nomor : 71
	Minggu Pahing, 25 April 2004	
	Halaman : 1 8	Kolom : 8--9 3--7

Golkar Tunggu Keputusan PKB

JAKARTA-Partai Golkar Senin malam akan mengadakan rapat pleno DPP yang dihadiri Wiranto, capres parpol itu, untuk membahas koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Kami sudah melakukan pendekatan dengan PKB. Dan materinya akan dibicarakan Senin malam antara DPP dan Wiranto. Fokusnya sudah mengarah ke sana," kata Ketua DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, di Jakarta, Sabtu.

Tetapi tentang siapa yang akan diajukan menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Wiranto, menurut Theo sepenuhnya terserah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pemimpin PKB. Ia mengakui, pendekatan informal sudah

(Bersambung hlm 8 kol 3)

Golkar...

(Sambungan hlm 1)

dilakukan kedua pimpinan partai itu, tetapi pendekatan juga telah dilakukan dengan partai lain.

"Kita akan makin berfokus ke sana, kecuali jika PKB tetap ingin mencalonkan Gus Dur sebagai presiden dalam pemilihan presiden 5 Juli depan."

Tentang rencana koalisi itu, menurut Theo telah dibahas secara maraton beberapa hari terakhir ini. Dalam pertemuan Senin malam, juga akan ditetapkan tim kampanye yang akan memenangkan pasangan capres-cawapres Golkar.

"Kami akan bersama-sama menyusun tim yang kompak dan solid, yang didukung seluruh jajaran organisasi dari terbawah untuk mempersiapkan kampanye selama dua bulan."

Tentang koalisi dengan PKB, diakui partai itu mempunyai platform yang saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan platform Golkar. Tetapi yang juga penting, cawapres yang diinginkan Partai Golkar adalah yang mempunyai nilai tambah mendukung figur capres, sehingga menjamin kemenangan pasangan tersebut.

Hal itu disadari, karena jalan-

nya pemerintahan yang akan datang peranan DPR cukup kuat. Karena itu kerjasama juga didasarkan kriteria-kriteria seperti itu.

Mengapa Partai Golkar lebih memfokuskan diri kepada PKB, Theo mengatakan, karena koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), PDI-P, Partai Demokrat maupun dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kecil kemungkinannya. Sebab partai-partai itu juga akan mengajukan capres pada pemilihan presiden mendatang.

Mengenai tuduhan pelanggaran HAM Wiranto, Theo mengatakan proses peradilan ad hoc HAM sudah dilewati, dan mantan Menhankam/Pangab dalam peradilan yang berlangsung secara terbuka telah dinyatakan tidak bersalah.

Ia menegaskan, Indonesia tetap konsisten terhadap HAM, dan figur Wiranto dalam track record-nya pun dinilai positif, antara lain turut mendorong reformasi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi demokratisasi.

"Wiranto di dalam negeri sudah *clear*, jika dia dipermasalahkan di luar negeri, itu menjadi tugas kita bersama untuk memberikan penjelasan secara intensif kepada pihak luar."

Rapim Partai Golkar kemarin gagal menetapkan cawapres partai

itu yang akan mendampingi Jenderal (purn) Wiranto. Akibatnya, partai berlambang pohon beringin itu masih belum bisa menetapkan siapa pendamping mantan panglima tersebut.

Ditunda

Mundurnya rapat itu akibat Wiranto tidak hadir pada pertemuan. Hal itu diperkirakan karena kesibukan melakukan lobi dan masih terjadi tarik-menariknya cawapres yang akan digandeng Wiranto. Apalagi PKB baru menetapkan cawapres setelah Mukernas yang digelar hari ini. Rapat itu menurut Ketua DPP Marzuki Darusman baru dilakukan Senin depan. "Rapat baru bisa dilakukan pada Senin malam besok," ujarnya.

Spekualsi yang berkembang berkaitan tertundanya rapat DPP untuk menetapkan cawapres dibantah Ketua Komite Tim Sukses Wiranto Jenderal TNI (Purn) Fachrul Rozi.

Penundaan rapat antara DPP Partai Golkar dan pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Golkar, Wiranto, menurut mantan Kasum TNI, bukan karena masih ada masalah yang mengganjal, termasuk upaya lobi dengan parpol lain. Penundaan terjadi karena Wiranto harus pulang mengunjungi orang tuanya.

"Nggak ada sesuatu yang menggajal dan belum sinkron antara DPP Partai Golkar dengan Wiranto. Wiranto sudah telepon langsung kepada Akbar Tandjung dan penundaan rapat itu tidak masalah," kata Fachrul di Jakarta Sabtu kemarin.

Padahal sebelumnya Marzuki Darusman mengakui, tertundanya mengambil keputusan cawapres karena belum satu kesepakatan antara DPP dengan tim sukses Wiranto. Menurut mantan Jaksa Agung itu, hal ini membuat penentuan calon wakil presiden (cawapres) Partai Golkar menjadi lambat dan diperlukan sinkronisasi antara tim sukses dan DPP PG.

Bukti belum sinkronnya kedua pihak ini, kata Marzuki, adalah ketidakhadiran Wiranto di rapat pleno DPP Partai Golkar hari Jumat. Padahal forum itu selama ini cukup disegani di Partai Golkar dan banyak mengambil kebijakan penting.

Marzuki menyayangkan penundaan rapat pleno itu, meskipun DPP Partai Golkar sepakat menjadwalkan kembali pada Senin malam. "Kita tetap menjadwalkan kembali Senin besok,"ujarnya.

Massa Kuat

Rapat pleno harian DPP Partai Golkar yang dijadwalkan Jumat

(23/4) malam bersama capres terpilih di Konvensi Partai Golkar, Wiranto, ditunda. Penundaan ini karena Wiranto tidak bisa hadir dengan alasan keluar kota. DPP menjadwalkan kembali rapat pleno pada Senin malam.

Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung di ruang kerjanya sebagai Ketua DPR, menyebutkan adanya rencana rapat pleno bersama capres terpilih, Wiranto. Namun menurut Akbar, rapat tersebut dipastikan ditunda hingga pekan depan.

Begitu juga jika Hasyim Muza-di berpasangan dengan capres dari PDI-P, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, PB NU akan lebih berat mendukungnya, dalam arti harus lebih keras bekerjanya. Namun, jika peluang kesempatan dan manfaat yang didapat NU, baik pengurus maupun umat, lebih besar, bukan mustahil bergabung dengan PDI-P yang menjadi pilihan.

"Jadi, kami di PB NU nanti akan memberikan petunjuk dan menentukan sikap, bergantung dari peluang kesempatan dan manfaat yang akan diperoleh NU dan warganya dan bangsa ini ketika harus menentukan pilihan-pilihan saat dilamar parpol." (di,ant-18,64)